

RINGKASAN BERITA HARI INI

Gus Mudhlor Dorong Kerjasama Perusahaan dengan SMK

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pembako) Sidoarjo terus melakukan upaya memajukan tingkat perekonomian, salah satunya dengan mendorong peningkatan peran serta dunia usaha dan industri (DUI) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Gus Mudhlor selaku Bupati Sidoarjo telah melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali, dan Kepala SMK Satria Utama Sidoarjo (SMKS) Satrio, H. Agus. Pertemuan ini membahas tentang pentingnya kerjasama antara dunia usaha dan industri dengan SMK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar tenaga kerja.

Dalam tahun 2023, Gus Mudhlor mendorong kerjasama antara dunia usaha dan industri dengan SMK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar tenaga kerja.

Didemo Pengeledek Sampah, Bupati Sepakat Revisi Tarif

SIDOARJO - Perhub Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPL) Kabupaten Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pempoko Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama pengeledek sampah menggelar demo di depan Pendopo Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Had Pamono menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan rencana revisi tarif yang ditetapkan pemerintah.

Tak mau berturut-turut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menanggapi perwakilan pendemo untuk diskusi di pendopo. "Kita mau mendengarkan, bukan untuk menentang," katanya.

TPST, Melekatkan sepiat tidak ada hubungan tonase lagi. Mudiho menyebutkan bahwa tarif layanan sampah yang dibayar per ton sampah (K) tetap akan diubah. Dalam pertemuan, tarif sampah yang dibayar ke TPST adalah Rp 130 per ton. Ini membuat paguyuban TPST merasa tidak puas karena sampah bisa dituntaskan di

Gus Muhdlor Perhub Sampah Segera Direvisi

SIDOARJO - Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPL) Kabupaten Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pempoko Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama pengeledek sampah menggelar demo di depan Pendopo Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Had Pamono menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan rencana revisi tarif yang ditetapkan pemerintah.

Tak mau berturut-turut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menanggapi perwakilan pendemo untuk diskusi di pendopo. "Kita mau mendengarkan, bukan untuk menentang," katanya.

Puskesmas Aktifkan Fogging Berantas Demam Berdarah

SIDOARJO - Antisipasi penyebaran demam berdarah serta penyakit nyamuk lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melakukan fogging berantas demam berdarah di berbagai wilayah. Kegiatan fogging dilakukan dengan menggunakan mesin fogging yang mengeluarkan cairan fogging beracun yang mematikan telur nyamuk. Fogging dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Gedangan, di Desa Bawahan. Fogging dilakukan dengan menggunakan mesin fogging yang mengeluarkan cairan fogging beracun yang mematikan telur nyamuk. Fogging dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Gedangan, di Desa Bawahan.

Kompak Tolak Kampanye di Tempat Ibadah

SIDOARJO - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Sidoarjo bersama tokoh agama di Sidoarjo kompak menolak kampanye di tempat ibadah. Mereka juga sepakat menghindarkan segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran sosial akibat polarisasi politik. Mahdlor meminta tim sukses, calon, dan warga tidak mengulangi tempat ibadah untuk kampanye.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo, H. Kholid, menyebutkan, tokoh agama di Sidoarjo tegas menolak kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Baik di masjid gereja, maupun pura. "Tempa ibadah harus digunakan sebagai sarana ibadah, bukan sebagai ajang kampanye politik," katanya.

Perhub Sampah Direvisi

SIDOARJO - Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPL) Kabupaten Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pempoko Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama pengeledek sampah menggelar demo di depan Pendopo Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Had Pamono menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan rencana revisi tarif yang ditetapkan pemerintah.

Job Matching SMK Dharma Siswa 1 Sidoarjo, Turunkan Angka Pengangguran

KOTA - Kegiatan job matching dilaksanakan di SMK Dharma Siswa 1 Sidoarjo, Selasa (16/5). Kepala SMK Dharma Siswa 1 Sidoarjo, Argo Ciptono, mengungkapkan bahwa pelaksanaan job matching oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mereka dapat bersaing di pasar tenaga kerja.

Dalam peristiwanya, dia menyampaikan bahwa semua pihak turut berperan serta dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan problem link and match di Sidoarjo.

Didemo Pengeledek Sampah, Bupati Sepakat Revisi Tarif

SIDOARJO - Perhub Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPL) Kabupaten Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pempoko Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama pengeledek sampah menggelar demo di depan Pendopo Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Had Pamono menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan rencana revisi tarif yang ditetapkan pemerintah.

Bupati Sidoarjo Bersama Tokoh Lintas Agama Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah

SIDOARJO - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Sidoarjo bersama tokoh agama di Sidoarjo kompak menolak kampanye di tempat ibadah. Mereka juga sepakat menghindarkan segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran sosial akibat polarisasi politik. Mahdlor meminta tim sukses, calon, dan warga tidak mengulangi tempat ibadah untuk kampanye.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo, H. Kholid, menyebutkan, tokoh agama di Sidoarjo tegas menolak kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Baik di masjid gereja, maupun pura. "Tempa ibadah harus digunakan sebagai sarana ibadah, bukan sebagai ajang kampanye politik," katanya.

Didemo Pengeledek Sampah, Bupati Sepakat Revisi Tarif

SIDOARJO - Perhub Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPL) Kabupaten Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pempoko Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama pengeledek sampah menggelar demo di depan Pendopo Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Had Pamono menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan rencana revisi tarif yang ditetapkan pemerintah.

Bupati Sidoarjo Bersama Tokoh Lintas Agama Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah

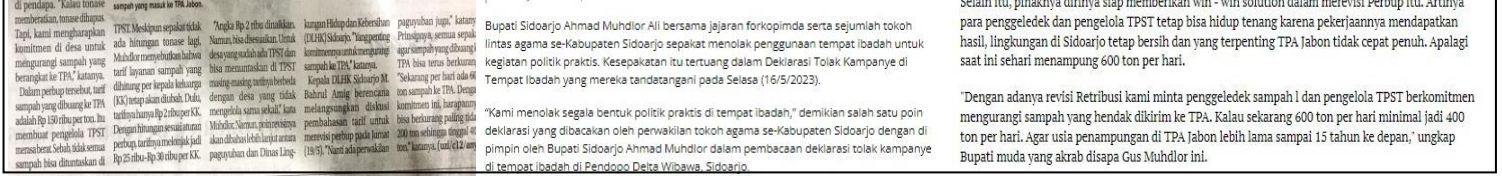
SIDOARJO - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Sidoarjo bersama tokoh agama di Sidoarjo kompak menolak kampanye di tempat ibadah. Mereka juga sepakat menghindarkan segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran sosial akibat polarisasi politik. Mahdlor meminta tim sukses, calon, dan warga tidak mengulangi tempat ibadah untuk kampanye.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo, H. Kholid, menyebutkan, tokoh agama di Sidoarjo tegas menolak kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Baik di masjid gereja, maupun pura. "Tempa ibadah harus digunakan sebagai sarana ibadah, bukan sebagai ajang kampanye politik," katanya.

Didemo Pengeledek Sampah, Bupati Sepakat Revisi Tarif

SIDOARJO - Perhub Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (PPL) Kabupaten Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama pengurus tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pempoko Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama pengeledek sampah menggelar demo di depan Pendopo Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Had Pamono menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan rencana revisi tarif yang ditetapkan pemerintah.



Selain itu, pihaknya dirinya siap memberikan win-win solution dalam merevisi Perhub itu. Artinya para pengeledek dan pengelola TPST tetap bisa hidup tenang karena pekerjaannya mendapatkan hasil, lingkungan di Sidoarjo tetap bersih dan yang terpenting TPA akan jadi tetap cepet penuh. Apalagi saat ini sehari menampung 600 ton per hari.

Dengan adanya revisi Retribusi kami minta pengeledek sampah dan pengelola TPST berkomitmen mengurangi sampah yang hendak dikirim ke TPA. Kalau sekarang 600 ton per hari minimal jadi 400 ton per hari. Agar usia penampungan di TPA akan lebih lama sampai 15 tahun ke depan," ungkap Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.

Ratusan Gerobak Sampah Blokir Pintu Masuk Pendopo

Tolak Perbup Tahun 2022

SIDOARJO - Bertempat di depan Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo menyuarakan aspirasinya, ratusan tukang sampah (penarik gerobak sampah) se-Sidoarjo menggelar demo memblokir pintu masuk pendopo dan jalan Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/5/23). Aksi ini bukan tanpa sebab, melainkan untuk menolak Peraturan Bupati (Perbup) tentang kenaikan biaya pengelolaan sampah karena merasa dirugikan dengan Perbup ini.

Ratusan para tukang sampah (penarik gerobak sampah) yang tergabung dalam Paguyuban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) ini memarkir truk, dan ratusan motor gerobak dan gerobak sampah di depan pintu masuk pendopo.

Dalam Aksi demo massa juga membentangkan sejumlah poster kecamatan. Diantaranya, Tarif Mahal Bukan Solusi Mengatasi Sampah, Tolong Dengar Jeritan Rakyat Bawah, Warga Keberatan Sengala Tarif Sampah yang Mahal, Kelola Sampah itu Tidak Mudah Jadi Jangan Tambah Masalah, Batakan Perbup Nomor 116, 117 dan 118 Tahun 2022 serta Hidup Sudah Susah, Biaya Hidup Mahal Kami Jangan Ditambah Susah dengan Tarif Mahal.

Para demonstran menuntut penarikan kembali Perbup No 116/2022

tentang Pedoman Perhitungan Pengelolaan Persampahan yang ditetapkan 9 Desember 2022 lalu.

Ketua Paguyuban TPST Sidoarjo Hadi Purnomo mengatakan Bupati yang dikeluarkan Bupati Sidoarjo terkait biaya pengelolaan sampah dari Rp.25 ribu hingga Rp 35 ribu per rumah memberatkan kami.

"Perbup yang baru dikeluarkan Bupati Sidoarjo ini memberatkan. Kenaikan biaya pengelolaan sampah dari Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per rumah menjadi Rp77 ribu per rumah," terang Hadi Purnomo.

Pihaknya mendesak Bupati Ahmad Muhdlor Ali mencabut kembali Perbup yang memberatkan warga dan petugas pengelola sampah (penarik gerobak) yang menyuarakan aspirasinya.

"Mari kita bicarakan. Silahkan kirim perwakilan ke dalam untuk kita diskusikan," ujar Muhdlor merespons aksi para tukang sampah.

Dalam pertemuan dengan perwakilan tukang sampah, Gus Muhdlor menyampaikan akan merevisi Perbup yang dipersalahkan tersebut.

"Dengan adanya revisi Retribusi Pakami minta pengegeledek sampah



Ratusan penarik(pengegeledek)gerobak sampah demo di depan Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Selasa (16/5/23)

(penarik gerobak)dan pengelola TPST berkomitmen mengurangi sampah yang hendak dikirim ke TPA. Kalau sekarang 600 ton per hari minimal jadi 400 ton per hari. Agar usia penampungan di TPA Jabon lebih lama sampai 15 tahun ke depan," ujar Gus Muhdlor.

sampah pak Poyo(60)mengatakan aksi ini terjadi karena biasanya masih Rp 20 ribu ujamya.

Hal ini juga dibenarkan Pak Ikhwan(80)warga Prambon yang sudah 20 tahun bekerja menarik gerobak sampah dan tidak pernah ada aksi demo seperti ini permasalahan.

Pengegeledek sampah(penarik gerobak) dirumah warga jangan dinaikan,masyarakat kalau ditinkan resah mengeluh tingginya tingginya penarikan sampah.

"Sekali lagi ini bukan demo kami ingin naik bayaran sampah tapi menolak kenaikan biaya bayar buang sampah di Tlocot,"pungkasnya. ● loe

DUTA

Didemo Ratusan Tukang Sampah

Bupati Sidoarjo Janji Revisi Perbup Retribusi Sampah

Sidoarjo, Bhirawa

Jangan remehkan tukang sampah. Bila mereka diabaikan, mereka juga bisa melakukan protes.

Seperti Selasa (16/5) pagi kemarin, ratusan tukang pengegeledek gerobak sampah dan pengelola TPST sampah di 18 kecamatan, demo minta pencabutan Perbup nomor 116,117 dan 118 tahun 2022 tentang kenaikan retribusi sampah.

Lama tidak juga ditemui oleh Bupati Sidoarjo, pendemo yang kepanasan di luar pagar pendopo Delta Wibawa, hati mereka semakin panas.

Sampai ada pendemo yang menumpahkan sampah di aspal jalan Cokronegoro No.1 Sidoarjo itu. Sepanjang 150 meter jalan depan Pendopo Delta Wibawa itu, dipenuhi oleh ratusan gerobak sampah.

Namun akhirnya Bupati Ahmad Muhdlor Ali menemui perwakilan pendemo dan melakukan sejumlah negosiasi terkait tuntutan. Perundingan cukup lama dan alot di dalam pendopo Delta Wibawa itu, Bupati

Ahmad Muhdlor Ali, akhirnya berjanji akan merevisi Perbup tersebut.

Namun, diinya juga titip pesan kepada para pengegeledek gerobak sampah, agar tidak hanya menjadi perantara membawa sampah dari rumah ke TPST dan ke TPA saja. Namun, juga ikut mengurangi sampah.

"Kalau tidak, maka TPA sampah di Kec Jabon akan cepat penuh dengan sampah," katanya, saat menemui secara langsung pendemo yang berada di luar pendopo delta wibawa.

Pengelola TPST di Desa Cembakalan, mengatakan sejak diterbitkannya Perbup kenaikan retribusi sampah itu, jumlah tukang pengegeledek gerobak sampah yang masuk ke TPST desa itu jumlahnya berkurang.

"Dulu sempat ada 25 orang pengegeledek sampah. Mungkin saat ini berkurang," katanya,

dalam demo tersebut.

Itu dikarenakan, warga-warga desa banyak yang berhenti langgan membuang sampah lewat para tukang pengegeledek sampah. Karena tarifnya naik. Dari sebelumnya warga ditarik Rp25.000/bulan menjadi Rp30.000/bulan.

Pengegeledek gerobak sampah juga keberatan. Bila dulu masuk ke TPST membawa sampah, hanya dikenai biaya Rp5.000 saja, sekarang ditarik Rp35.000.

Menurut dirinya, yang membuang sampah ke TPST Desa Cembakalan tidak hanya warga desa setempat saja. Tetapi juga warga desa dari luar desa dan luar kecamatan.

Misalnya ada dari desa-desa di Kec Candi, desa dari Kec Wonoayu dan desa dari Kec Sidoarjo.

Yang ia khawatirkan, apabila warga desa berhenti tidak langgan membuang sampah lewat tukang pengegeledek sampah, lantas sampah sampah mereka dibuang kemana? Dirinya berharap warga desa tidak



Foto sampah yang sempat dibuang oleh pendemo, ke aspal jalan Cokronegoro, di depan pendopo Delta Wibawa

sampai membuangnya secara sembarangan. Misalnya ke sungai, ke pinggir jalan dan ke lahan-lahan

kosong yang bukan miliknya. "Kalau sampai terjadi, maka tentu saja akan banyak terjadi

polusi dan pencemaran terhadap lingkungan di Kab Sidoarjo," katanya. [kus.gat]

Ratusan Tukang Sampah Sidoarjo Tuntut Revisi Perbup

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Ratusan Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) alias tukang sampah se-Kabupaten Sidoarjo berunjuk rasa di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (16/5). Mereka menuntut agar Perbup Nomor 116, 117 dan 118 Tahun 2022 direvisi karena dinilai memberatkan para pengelola sampah.

Para pengelola TPST ini datang ke depan Pendapa Delta Wibawa sembari membawa gerobak sampahnya. Mereka juga membawa truk berisi sound system untuk orasi dan sejumlah poster bertuliskan sejumlah aspirasinya.

Dalam perbup itu, terdapat biaya pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon sebesar Rp 150 ribu

per ton. Itu masih ditambah adanya biaya retensi sebesar Rp 165 ribu per ton. "Kami keberatan dengan biaya tersebut," cetus Ketua Paguyuban TPST se-Kabupaten Sidoarjo (PPTKS) Hadi Purnomo.

Ia mendesak agar Bupati Sidoarjo merevisi perda tersebut. Jika perlu tarif dikembalikan ke perbup yang lama, yakni Perbup Nomor 6 Tahun 2012. Di perbup lama itu, tarif pembuangan sampah ke TPA Jabon hanya Rp 2.000 per-KK, bukan berdasarkan berat sampah.

Bupati Ahmad Muhdlor yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bahrul Amig memenuhi tuntutan para pengelola TPST itu. Bupati Muhdlor berjanji bakal segera merevisi

perbup tentang biaya pengelolaan sampah tersebut.

Namun soal besaran biaya pengiriman sampah ke TPA Jabon itu, perlu dibahas lagi dengan DLHK Sidoarjo. Sebab, jika kembali menggunakan tarif lama, Rp 2.000 per-KK, maka TPA Jabon bakal cepat penuh.

"Dalam hitungan teknis, hanya lima tahun TPA Jabon bakal penuh lagi. Karena tarif murah memicu orang tidak mengelola sampah, akan tetap menjadi penyalur sampah dari TPST ke TPA saja," tandasnya.

Selain merevisi perbup, Bupati Muhdlor juga meminta para pengelola TPST se-Kabupaten Sidoarjo untuk komitmen mengelola sampah di TPST, sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon, bisa berkurang. (sta/rd)



Aksi demo pengelola TPST di depan Pendapa Delta Wibawa, Selasa (16/5).

Gus Muhdlor Perbup Sampah Segera Direvisi



DARYANTO/DUTA

Dua OPD Dinkop dan Disperindag Sidoarjo siap canangkan Zona Integritas WBK/WBBM, Senin (15/5).

SIDOARJO - Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 116-118 Tahun 2022 tentang perhitungan biaya pengelolaan persampahan yang dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) direvisi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Revisi itu dilakukan sebagai win-win solution (jalan keluar) dalam mengatasi masalah persampahan di Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang menemui sejumlah perwakilan paguyuban TPST mendengarkan satu persatu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah. Kesimpulan dari pertemuan itu para pengelola sampah yang ada di TPST/TPS 3R merasa keberatan dengan penetapan tarif, Selasa (16/5/2023) di Pendopo Delta Wibawa.

Tarif yang ditetapkan untuk warga desa dan permukiman, senilai Rp 25 ribu-Rp 35 ribu per bulan yang tertuang dalam Perbup Nomor 116, 117 dan 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan. Kemudian tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton Rp. 150.000 dan biaya angkut truk sampah dari TPST ke TPA Jabon Rp.165.000.

Latar belakang dibuatnya perbup sampah tersebut untuk mengurangi volume sampah yang ada di TPA Jabon. Sampah yang dikirim di TPA

Jabon saat ini sudah overload sudah mencapai 600 ton perharinya. Bila hal itu dibiarkan terus maka umur TPA Jabon diprediksi hanya mampu bertahan 5 tahun.

"Pertemuan untuk mencari titik temu win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Pemkab mendapat solusi jalan keluar mengatasi sampah dan paguyuban pengelola TPST tidak merasa dirugikan. Tujuan kita semua duduk disini mencari jalan keluar. Jangan sampai anak cucu kita mendapat warisan sampah jika sampah yang ada sekarang tidak dikelola dengan baik," ujar Gus Muhdlor.

Pada pertemuan tersebut disepakati dua hal. Pertama perbup sampah akan direvisi terkait penetapan tarif yang dinilai memberatkan dan yang kedua disepakati bahwa para pengelola TPST harus berkomitmen mengelola sampah di TPST sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon berkurang.

"Tidak ada menang-menangan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik mengatasi masalah sampah Sidoarjo. saya minta pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban TPST berkomitmen untuk mengelola sampah di TPSP masing-masing paling tidak yang dikelola capai 60 persen dan si-

sanya yang sudah tidak bisa dikelola dikirim ke TPA Jabon," terangnya.

Bupati Gus Muhdlor meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan segera duduk bersama dengan para perwakilan paguyuban untuk membahas besaran retribusi sampah di TPA Jabon.

"Perbup sampah yang mengatur tarif akan direvisi. Saya minta DLHK dan perwakilan paguyuban duduk bersama membahas kesepakatan tarif ini," jelas Gus Muhdlor.

Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amiq menyampaikan, pertemuan dengan para perwakilan akan dilakukan secepatnya. Ia menjadwalkan hari Jum'at besok pertemuan dilakukan di Kantor DLHK.

"Lebih cepat lebih baik, kita agendakan hari Jumat besok, karena Kamisnya tanggal merah. Nanti akan dibahas bersama dengan para perwakilan 7 orang," katanya.

Amig berharap dalam pertemuan tersebut mencapai kesepakatan yang bisa menjadi jalan keluar dalam mengatasi persoalan sampah di Sidoarjo. Mantan Kadishub Sidoarjo itu dengan gamblang menyampaikan jika sekarang perhari sampah yang masuk di TPA Jabon 600 ton paling tidak setelah adanya komitmen ini nanti sampah berkurang jadi 400 ton. ●dar



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DAMA: Paguyuban TPST menggelar aksi di depan Pendapa Delta Wibawa sebelum bertemu dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Dikeluhkan Paguyuban TPST, Gus Muhdlor Revisi Perbup Tentang Sampah

KOTA-Perbup nomor 116-118 Tahun 2022 tentang perhitungan biaya pengelolaan persampahan yang dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) direvisi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Revisi itu dilakukan sebagai win-win solution dalam mengatasi masalah persampahan di Sidoarjo.

Muhdlor yang menemui sejumlah perwakilan paguyuban TPST mendengarkan satu persatu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah, Selasa (16/5). Para pengelola sampah yang ada di TPST/TPS 3R merasa keberatan dengan penetapan tarif.

Tarif yang ditetapkan untuk warga desa dan permukiman, senilai Rp 25 ribu-Rp 35 ribu per bulan yang tertuang dalam Perbup Nomor 116, 117 dan 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan.

Kemudian tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton Rp. 150 ribu dan biaya angkut truk sampah dari TPST ke TPA Jabon Rp 165 ribu.

"Pertemuan untuk mencari win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Pemkab mendapat solusi jalan keluar mengatasi sampah dan paguyuban pengelola TPST tidak merasa dirugikan. Tujuan kita semua duduk disini mencari jalan keluar. Jangan sampai anak cucu kita mendapat warisan sampah jika sampah yang ada sekarang tidak dikelola dengan baik," ujar Gus Muhdlor sapaan bupati.

Pada pertemuan tersebut disepakati dua hal. Pertama perbup sampah akan direvisi terkait penetapan tarif yang dinilai memberatkan dan yang kedua disepakati bahwa para pengelola TPST harus berkomitmen mengelola sampah

● Ke Halaman 10



Dikeluhkan Paguyuban...

di TPST sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon berkurang. "Tidak ada menang-menangan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik mengatasi masalah sampah Sidoarjo. Saya minta pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban TPST berkomitmen untuk mengelola sampah di TPST masing-masing paling tidak yang dikelola capai 60 persen

dan sisanya yang sudah tidak bisa dikelola dikirim ke TPA Jabon," terangnya.

Gus Muhdlor meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan segera duduk bersama dengan para perwakilan paguyuban untuk membahas besaran retribusi sampah di TPA Jabon.

"Perbup sampah yang mengatur tarif akan direvisi. Saya minta DLHK dan perwakilan paguyuban duduk

bersama membahas kesepakatan tarif ini," jelasnya.

Sementara itu Kepala DLHK Sidoarjo M Bahrul Amiq menyampaikan, pertemuan dengan para perwakilan akan dilakukan secepatnya.

"Lebih cepat lebih baik, kita agendakan hari Jumat besok. Nanti akan dibahas bersama dengan para perwakilan tujuh orang," katanya.

Koordinator paguyuban TPST Hadi Purnomo mengaku lega dengan direvi-

sinya perbup sampah oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Ia juga mengaku siap menjalankan komitmen bersama para pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban. (nul/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Didemo Penggeledék Sampah, Bupati Sepakat Revisi Tarif

SIDOARJO – Perbup Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan di Sidoarjo bakal direvisi. Keputusan tersebut diambil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor setelah diskusi bersama paguyuban tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Pendapa Delta Wibawa kemarin (16/5).

Sebelum diskusi digelar, paguyuban TPST bersama penggeledék sampah menggelar demo di depan Pendapa Delta Wibawa. Mereka membawa gerobak berisi sampah. Koordinator Paguyuban TPST Hadi Purnomo menyebutkan, demo dilakukan karena pihaknya tidak sepakat dengan aturan yang tertuang dalam perbup tersebut.

Tak mau berlarut-larut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memanggil perwakilan pendemo untuk diskusi di pendapa. "Kalau tonase memberatkan, tonase dihapus. Tapi, kami mengharapkan komitmen di desa untuk mengurangi sampah yang berangkat ke TPA," katanya.

Dalam perbup tersebut, tarif sampah yang dibuang ke TPA adalah Rp 150 ribu per ton. Itu membuat pengelola TPST merasa berat. Sebab, tidak semua sampah bisa dituntaskan di



TUNTUT TURUNKAN TARIF: Anggota Paguyuban Pengelola TPST se-Kabupaten Sidoarjo berunjuk rasa kemarin. Mereka menolak tingginya biaya sampah yang masuk ke TPA Jabon.

TPST. Meskipun sepakat tidak ada hitungan tonase lagi, Muhdlor menyebutkan bahwa tarif layanan sampah yang dihitung per kepala keluarga (KK) tetap akan diubah. Dulu, tarifnya hanya Rp 2 ribu per KK. Dengan hitungan sesuai aturan perbup, tarifnya melonjak jadi Rp 25 ribu–Rp 30 ribu per KK.

"Angka Rp 2 ribu dinaikkan. Namun, bisa disesuaikan. Untuk desa yang sudah ada TPST dan bisa menuntaskan di TPST masing-masing, tarifnya berbeda dengan desa yang tidak mengelola sama sekali," kata Muhdlor. Namun, poin revisinya akan dibahas lebih lanjut antara paguyuban dan Dinas Ling-

kungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. "Yang penting komitmennya untuk mengurangi sampah ke TPA," katanya.

Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig berencana melangsungkan diskusi pembahasan tarif untuk merevisi perbup pada Jumat (19/5). "Nanti ada perwakilan

paguyuban juga," katanya. Prinsipnya, semua sepakat agar sampah yang dibuang ke TPA bisa terus berkurang. "Sekarang per hari ada 600 ton sampah ke TPA. Dengan komitmen ini, harapannya bisa berkurang paling tidak 200 ton sehingga tinggal 400 ton," katanya. (uzi/c12/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menemui perwakilan paguyuban TPST serta mendengar satu per satu keluhan yang disampaikan pengelola sampah di Pendopo Delta Wibawa.

Perbup Sampah Direvisi perihal Penetapan Tarif

Sidoarjo, Memorandum

Perbup Sidoarjo nomor 116-118 tahun 2022 tentang Perhitungan Biaya Pengelolaan Persampahan yang dikeluhkan Paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) direvisi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Revisi itu dilakukan sebagai *win-win solution* (jalan keluar) dalam mengatasi masalah persampahan di Sidoarjo. Bupati yang menemui sejumlah perwakilan paguyuban TPST mendengar satu per satu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah, Selasa (16/5), di Pendopo Delta Wibawa.

Kesimpulan dari pertemuan itu para pengelola sampah yang ada di TPST atau TPS 3R merasa keberatan dengan penetapan tarif. Tarif yang ditetapkan untuk warga desa dan permukiman senilai Rp 25 ribu Rp 35 ribu per bulan yang tertuang dalam Perbup nomor 116, 117, dan 118 tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan.

Kemudian tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton Rp 150.000 dan biaya angkut truk sampah dari TPST ke TPA Jabon Rp 165.000. Latar belakang dibuatnya perbup sampah tersebut untuk mengurangi volume sampah yang ada di TPA Jabon. Sampah yang dikirim di TPA Jabon saat ini sudah *overflow* sudah mencapai 600 ton per harinya. Bila hal itu dibiarkan terus maka umur TPA Jabon diprediksi hanya mampu bertahan 5 tahun.

"Pertemuan untuk mencari titik temu (*win-win solution*) tidak boleh ada yang dirugikan. Pemkab mendapat solusi jalan keluar mengatasi sampah dan paguyuban pengelola TPST tidak merasa dirugikan. Tujuan kita semua duduk di sini mencari jalan keluar. Jangan sampai anak cucu kita mendapat warisan sampah jika sampah yang ada sekarang tidak dikelola dengan baik," ujar Gus Muhdlor, sapaan akrab bupati.

Pada pertemuan tersebut disepakati dua hal. Pertama perbup sampah akan direvisi terkait penetapan tarif yang dinilai memberatkan dan yang kedua disepakati bahwa para pengelola TPST harus berkomitmen mengelola sampah di TPST sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon berkurang.

"Tidak ada menang-menangan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik mengatasi masalah sampah Sidoarjo. saya minta pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban TPST berkomitmen untuk mengelola sampah di TPST masing-masing paling tidak yang dikelola capai 60 persen dan sisanya yang sudah tidak bisa dikelola dikirim ke TPA Jabon," jelas bupati.

"Tiap tahun kita bangun TPST dan dari jumlah 80 titik dalam dua tahun ini sudah bertambah menjadi 170-an titik TPST. Ini terus kita dorong TPST lebih diberbanyak lagi agar pengelolaan sampah tiap desa bisa lebih maksimal," pungkask bupati.

Kepala DLHK Sidoarjo M Balurul Amiq menyampaikan, pertemuan dengan para perwakilan akan dilakukan secepatnya. Ia menjadwalkan hari Jumat pekan ini pertemuan dilakukan di Kantor DLHK.

"Lebih cepat lebih baik, kita agendakan Jumat mendatang karena Kamis tanggal merah. Nanti akan dibahas bersama dengan para perwakilan 7 orang," kata Amiq.

Koordinator Paguyuban TPST Hadi Purnomo mengaku lega dengan direvisinya perbup sampah oleh Bupati Sidoarjo. Ia mengaku siap menjalankan komitmen bersama para pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Bupati dan kami siap komitmen ikut mendukung menuntaskan masalah sampah dengan maksimal mengelola di TPST. Jangan sampai sampah yang ada di TPA Jabon cepat penuh," tuturnya. (jok/nov)

MEMORANDUM
BEKRIA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FIRMA ZUHDI/JAWA POS

SATU SUARA: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama jajaran Forkopimda Sidoarjo dan tokoh agama saat memimpin deklarasi menolak kampanye di tempat ibadah.

Kompak Tolak Kampanye di Tempat Ibadah

SIDOARJO - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo bersama tokoh agama di Sidoarjo kompak menolak kampanye di tempat ibadah. Komitmen tersebut mereka tunjukkan dengan deklarasi bersama di Pendapa Delta Wibawa kemarin (16/5).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, Komandan Kodim Sidoarjo Letkol Inf Masarum Djati Laksono, dan tokoh lintas agama turut menandatangani deklarasi tolak kampanye di tempat ibadah. Muhdlor

memimpin langsung deklarasi. "Kami sepakat untuk menolak segala bentuk politik praktis yang dilakukan di tempat ibadah," ujar Muhdlor.

Mereka juga sepakat menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik. Muhdlor meminta tim sukses, calon, dan warga tidak menggunakan tempat ibadah untuk kampanye.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo Idham Kholiq menyebutkan, tokoh agama

di Sidoarjo tegas menolak kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Baik di masjid, gereja, maupun pura. "Tempat ibadah harus digunakan sebagaimana fungsinya," katanya.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menyatakan, pascadeklarasi, pihaknya bakal meneruskan agar ada komitmen juga di tingkat desa maupun kecamatan. Pihaknya berencana mengumpulkan tokoh seluruh agama di tiap desa dan kecamatan. "Sehingga komitmen ini bisa dipahami menyeluruh hingga ke desa-desa," pungkasnya. (uzi/c12/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

17 Parpol Menuju Proses Verifikasi Administrasi

KOTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo telah menerima semua berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, ada 17 partai politik (parpol) dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Yaitu proses verifikasi administrasi.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak menjelaskan bahwa masa pengajuan pendaftaran bacaleg berakhir pada Minggu (14/5) pukul 23.59. Hanya Partai Garuda yang



Saat ini kami lanjutkan ke tahap verifikasi administrasi, dimulai 15 Mei hingga 23 Juni,"

M ISKAK
Ketua KPU Sidoarjo

tidak mendaftarkan. "Saat ini kami lanjutkan ke tahap verifikasi administrasi, dimulai 15 Mei hingga 23 Juni," katanya.

Dia menjelaskan, tahapan verifikasi itu bertujuan untuk memastikan keabsahan atau keaslian berkas persyaratan administrasi bacaleg dari 17 parpol tersebut. Proses verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bacaleg.

Termasuk dokumen kependudukan, KTP, surat keterangan kesehatan, dan bebas

narkoba, serta surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi terpidana atau dalam kondisi yang menghambat status pekerjaan.

"Ijazah juga menjadi salah satu berkas yang akan diverifikasi," ujarnya.

Iskak menyebutkan, persyaratan administrasi bacaleg membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses verifikasi. Terutama untuk memverifikasi keaslian ijazah dan dokumen yang dikeluarkan di luar

Sidoarjo.

Selain itu, jika terdapat berkas administrasi yang menimbulkan keraguan, KPU akan melakukan klarifikasi dengan instansi yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

Hasil verifikasi terkait persyaratan bacaleg oleh KPU Sidoarjo akan langsung disampaikan kepada masing-masing partai politik.

"Hasil verifikasi akan kami sampaikan kepada parpol sekitar 25 hingga 26 Juni," katanya.

● Ke Halaman 10



17 Parpol Menuju...

Tahap selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki dokumen persyaratan bacaleg yang belum memenuhi syarat. Sedangkan tahap penyusunan daftar calon sementara diperkirakan akan dilakukan pada bulan Juli-Agustus.

Parpol diberi waktu sekitar 14 hari untuk memperbaiki dokumen administrasi bacaleg yang belum memenuhi syarat. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gus Mudhlor Dorong Kerjasama Perusahaan dengan SMK

SIDOARJO (BM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus melakukan upaya menurunkan angka pengangguran. Salah satunya, dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sidoarjo kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan.

Seperti yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yang menggelar Job Matching 2023 di SMK Krian 1 dengan diikuti belasan perusahaan dan ratusan lowongan kerja yang dibuka Senin (15/5).

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menyampaikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) punya sumbangsih besar terhadap negara. Sekolah kejuruan mencetak siswa terampil yang dibekali kompetensi siap bersaing di dunia kerja.

"Job Matching ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha dan para pencari kerja. Perusahaan dapat menemukan calon pekerja sesuai kualifikasi yang mereka terapkan dan pencari kerja dapat menemukan posisi yang sesuai dengan keahliannya," ujarnya.

Sidoarjo pernah mengalami ledakan angka pengangguran. Dimana tingginya angka pengangguran saat itu karena dampak pandemi covid-19. Sejak intervensi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dengan gencar membuka Job Matching di SMK-SMK serta Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berdampak positif dengan menurunnya angka pengangguran.

Data tahun 2021 angka pengangguran Sidoarjo diangka 10,87 persen. Hal ini karena dampak pandemi covid. Langkah

yang dilakukan Pemkab Sidoarjo kemudian terus memberikan intervensi melalui Bursa Kerja khusus (BKK). Hasilnya di tahun 2022 angka pengangguran turun menjadi 8,80 persen.

"Dari data tersebut langkah-langkah kerjasama antara sekolah SMK dengan perusahaan terus kita dorong untuk menekan angka pengangguran di kota Delta ini," terang Gus Muhdlor.

Putra KH. Agoes Ali Masyhuri itu juga berpesan agar sekolah SMK terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri. "Untuk bisa masuk dalam persaingan dibutuhkan ketrampilan yang mumpuni. Untuk itu kita harus siapkan dan prioritaskan peningkatan kompetensi anak didik kita," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia menjelaskan bahwa Job Matching ini merupakan bentuk fasilitasi kepada mereka para siswa lulusan SMK. Menurut Ainun tiap tahun lulusan SMK banyak contohnya SMK Krian 1 tiap tahun meluluskan 600 siswa belum termasuk sekolah lainnya.

Hal itu yang mendorong Disnaker membuka Job Matching di SMK untuk mempertemukan perusahaan dengan calon pekerja dari tenaga terampil SMK. "Tiap tahun angka pengangguran berpotensi bertambah. Maka dengan Job Matching akan membantu SMK mendapatkan peluang bisa bekerja langsung setelah lulus sekolah," kata Ainun.

Kepala sekolah SMK Krian 1, Dhini Mekarsari menyampaikan terdapat sekitar 15 perusahaan yang menjadi rekanan SMK Krian 1. "Saat ini ada 58 lowongan pekerjaan yang membutuhkan 448 tenaga kerja, untuk itu kesempatan yang baik ini tidak boleh terlewatkan. Kami akan menggeber kemampuan anak didik kami, yang selanjutnya mempunyai daya saing tinggi," ujarnya. (udi)



Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)

BM1ST

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Job Matching SMK Darma Siswa 1 Sidoarjo, Turunkan Angka Pengangguran

KOTA-Kegiatan job matching dilaksanakan di SMK Darma Siswa 1 Sidoarjo, Selasa (16/5). Kepala SMK Darma Siswa 1 Sidoarjo, Argo Ciptono, mengungkapkan bahwa pelaksanaan job matching oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo bersama 18 SMK wilayah Waru dan 15 perusahaan berjalan dengan lancar.

Dalam pernyataannya, dia menyampaikan bahwa semua pihak turut berperan serta dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan problem link and match di Sidoarjo.

"Peningkatan kesempatan

kerja ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran," katanya.

Bahkan menurut dia, secara tidak langsung memaksa para tenaga pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan materi untuk akselerasi kompetensi peserta didik sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang diinginkan oleh di perusahaan-perusahaan tersebut.

Dia menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang hadir di Sidoarjo sebagian besar merupakan industri padat modal.

● Ke Halaman 10



KOMPAK: Kepala SMK Darma Siswa 1 Sidoarjo H Argo Ciptono, S.T., M.M., (tiga dari kiri) bersama Kepala Disnaker Ainun Amalia, Camat Waru, Danranmil, Kepala MKKS Sidoarjo, kepala desa, serta perusahaan dalam kegiatan Job Matching Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Kabupaten Sidoarjo.



Job Matching SMK...

Artinya mengedepankan teknologi. Hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi hal ini, Argo menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan PTSSU dalam mengembangkan Teaching Factory (TeFa).

Siswa memperoleh kepercayaan untuk merakit produk. Hal itu menciptakan sikap kerja siswa yang jujur, tahan banting, dan mampu bekerjasama/team work. "Itu menjadi modal penting dalam menghadapi dunia kerja," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan sepeda motor listrik yang diberi nama MAWA EV One, sehingga lulusan tidak merasa canggung ketika

berhadapan dengan industri yang memiliki modal besar. Harapan kedepannya, Job Matching harus terus berkembang dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia menambahkan bahwa angka pengangguran tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

Karena setiap tahun selalu ada lulusan baru. Di Sidoarjo, setiap SMK menghasilkan sekitar 600 siswa lulus setiap tahunnya. Yang berarti ada sekitar 24 ribu lulusan SMK setiap tahun.

Oleh karena itu, kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk lulusan SMK tetap diadakan secara rutin. Meskipun lulusan SMK seringkali dianggap sebagai penyumbang peng-

angguran terbesar, namun kontribusi mereka dalam mengurangi angka pengangguran juga signifikan.

"Pihak sekolah diharapkan membekali siswa tidak hanya dengan

hard skill, tetapi juga soft skill serta kemampuan spesifik yang dibutuhkan oleh pasar kerja di Sidoarjo," imbuhnya.

Diharapkan, melalui job matching

ini, lulusan SMK di Sidoarjo dapat memiliki peluang yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja dan turut berperan dalam pengurangan angka pengangguran. (nis/vga)



5.918 Keluarga Beresiko Stunting di Sidoarjo Terima Bantuan Pangan

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 5.918 keluarga beresiko stunting yang ada di Kab Sidoarjo, tahun 2023 ini akan dapat bantuan, program penyaluran bantuan cadangan pangan protein (BCPP) dari Kementerian Pangan RI. Penyaluran bantuan ini bekerja sama dengan Dinas PAKB dan PT POS Indonesia.

Kepala Bidang KB dan Ketahanan Pangan Dinas P3AKB Kab Sidoarjo, Rachmat Satriawan SSos MHP, mengatakan bantuan ini akan disalurkan selama 3 bulan. Yakni untuk Bulan Mei, Juni dan Juli. Jenis bantuan yang diberikan adalah, 1 ekor ayam frozen seberat 1 kg dan 10 butir ayam. "Penyaluran bantuan pada Bulan Mei ini, berakhir pada 15 Mei kemarin," kata Satriawan, Selasa (16/5) kemarin.

Pada tanggal 15 Mei kemarin, penyaluran dilakukan untuk Kec Sidoarjo, Wonoayu, Balongbendo, Tarik dan Prambon. Penyaluran dilakukan di kantor Kecamatan masing-masing. Untuk mengambil bantuan ini di kantor kecamatan, penerima bantuan harus membawa persyaratan, seperti KTP KK, dan surat undangan dari desa/kelurahan. "Keluarga beresiko stunting penerima bantuan ini banyak ada di Kec Taman," kata Satriawan. [kus.ca]



alikusyanto/bhirawa.

Para ibu dari keluarga beresiko stunting, saat mengambil bantuan di pendopo kantor Kec Sidoarjo.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Puskesmas Aktifkan Fogging Berantas Demam Berdarah

SIDOARJO - Antisipasi penyebaran demam berdarah serta berantas nyamuk dan jentik nyamuk, Dinas kesehatan Sidoarjo melalui Puskesmas Gedangan fogging rumah warga Desa Punggul Kecamatan Gedangan Selasa (16/5/23). Kegiatan sebagai wujud kepedulian dan sinergitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo khususnya warga Kecamatan Gedangan.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes Fogging adalah cara untuk memberantas nyamuk Aedes Aegypti penyebab demam berdarah. Untuk itu Dinkes melalui Puskesmas gedangan didampingi Pemdes Punggul melaksanakan kegiatan fogging.

Senada Kepala Puskesmas Gedangan, dr. Barbara Irawaty menambahkan, Hasil pelaporan terdapat 1 kasus DBD dan setelah dilaksanakan PE (penyelidikan epidemiologi) petugas puskesmas di dapatkan jentik di area sekitar rumah penderita.

“Untuk itu Dinkes melalui Puskesmas gedangan didampingi pemdes punggul melaksanakan kegiatan fogging focus

di RT 04 RW 02 dengan total 300 rumah yang di fogging.”

Mengingat fogging hanya membunuh nyamuk dewasa maka diharapkan seluruh masyarakat melaksanakan gerakan 4M plus yaitu menguras bak kamar mandi 1 minggu sekali, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas (tempat botol minum) .4. Memantau jentik dirumah sendiri dan Plus memakai kelambu.

Masih kata dr. Ira yang perlu diingat, memberantas jentik hanya bisa dengan Gerakan 4 M plus, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa.

“Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan sinergitas dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo khususnya warga Kecamatan Gedangan,” pungkaskan mantan Kepala Puskesmas Wonoayu tersebut.

Dalam kegiatan fogging dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati, beserta Kabid dr. Atok, dr. Ira (Kapus Gedangan) beserta jajarannya dan kepala Desa Punggul beserta ibu tim penggerak PKK desa. ● loe



Kadinkes Sidoarjo Fenny Apridawati beserta jajaran dan Kepala Puskesmas Gedangan dr. Barbara Irawaty, Kades dan penggerak PKK tinjau fogging rumah warga Selasa (16/5/23).

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BMIST

RAKER: Rapat kerja (Raker) sekaligus halal bihalal alumni Unair Sidoarjo yang diadakan di Fave Hotel Sidoarjo.

Pencegahan Stunting Jadi Program Unggulan Ika Unair Sidoarjo

SIDOARJO (BM) - Masalah stunting yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim) menjadi perhatian khusus dari Pengurus Cabang Ikatan Alumni Universitas Airlangga (PC Ika Unair Sidoarjo).

“Saya yakin ini merupakan perhatian khusus beliau (Khofifah Indar Parawansa) kepada teman-teman Pengurus Cabang Ika Unair Sidoarjo. Apalagi PC Sidoarjo ini menjadi indikator keaktifan PC-PC lain di Jatim dan Indonesia untuk pencegahan stunting dan akan menjadi program unggulan. Nanti akan kita kumpulkan PC-PC lain untuk dikerjakan bersama,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Ika Unair Indra Nur Fauzi dalam rapat kerja (Raker) sekaligus halal bihalal alumni Unair Sidoarjo yang diadakan di Fave Hotel Sidoarjo.

Ia mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang sekaligus Ketua Umum Ika Unair menaruh perhatian besar kepada isu stunting ini. Bahkan, Khofifah mengundang khusus para Pengurus Ika Unair Sidoarjo dalam pertemuan di Gedung Grahadi, Surabaya.

Khofifah berpesan agar Ika Unair Sidoarjo ikut aktif dalam menurunkan stunting. Bahkan, program ini bisa dilakukan oleh para pengurus cabang Ika

Unair di Jawa Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim Restu Novi Widiani yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, alumni Unair bisa mendukung Satgas Stunting yang telah dibentuk. Salah satunya menurunkan angka stunting di Sidoarjo dari 16 persen menjadi 14 persen.

Sebelum digelar raker, diadakan acara halal bihalal yang dihadiri sekitar 180 peserta yang berasal dari berbagai angkatan, fakultas, dan program studi.

Dalam tauziah halal bihalal, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH Ainul Yaqin mengungkapkan, makna silaturahmi adalah menyambung terus-menerus.

Sementara itu, Ketua Ika Unair Sidoarjo Abdullah Kizam berharap dengan halal bihalal para alumni bisa lebih berdaya dan guyup. “Yang penting tetap menjaga nama baik almamater dan alumni dan tetap kompak,” ucapnya.

Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati, Direktur RSUD Sidoarjo dr Atok Irawan, para Pengurus Wilayah (PW) Jatim, dan Pengurus Pusat (PP) Ika Unair. (udi)

Ratusan Pengelola TPST Dan Pengeledek Sampah Luruk Pendopo Sidoarjo, Desak Revisi Perbup Retribusi Sampah

REDAKSI 16 MEI 2023 14:07:25



LURUK - Ratusan pengelola TPST dan pengeledek meluruk Pendopo Delta Wibawa menurut revisi biaya tonase saat mengirim sampah ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) Jabon, Sidoarjo dengan membawa truk dan gerobak sampah, Selasa (16/05/2023).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan pengelola dan pengeledek sampah se Kabupaten Sidoarjo meluruk Pendopo Delta Wibawa, Selasa (16/05/2023). Mereka demo sembari membawa truk dilengkapi sound sistem dan ratusan gerobak sampah hingga memenuhi sepanjang jalan raya yang ada di depan Pendopo Pemkab Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mereka menuntut Bupati Sidoarjo merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 116, 117 dan Nomor 118 Tahun 2022 tentang Retribusi Sampah. Para pendemo ini mendesak Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali untuk merevisi poin biaya pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon senilai Rp 150.000 per ton. Selain itu, mereka mendesak revisi biaya retensi yang mencapai Rp 165.000 per ton.

Dalam aksi itu, massa juga membentangkan sejumlah poster kecaman. Diantaranya, Tarif Mahal Bukan Solusi Mengatasi Sampah, Tolong Dengar Jeritan Rakyat Bawah, Warga Keberatan Sengaja Tarif Sampah yang Mahal, Ngelolah Sampah itu Tidak Mudah Jadi Jangan Tambah Masalah, Batalkan Perbup Nomor 116, 117 dan 118 Tahun 2022 serta Hidup Sudah Susah, Biaya Hidup Mahal Kami Jangan Ditambah Susah dengan Tarif Mahal.

Salah seorang Pengelola TPST Barengkrajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Ny Endang mengatakan dengan kenaikan tarif sampah rumah tangga senilai Rp 25.000 - Rp 35.000 para pengeledek yang dibayar Pengelola TPST tidak mendapatkan uang honor. Karena itu, sejak adanya Perbup pengelolaan sampah yang baru itu para pengeledek merasa kebaratan. Sebab selama ini, rata - rata pengeledek mendapat honor Rp 900.000 sampai Rp 1,5 juta per bulan.

"Kami mendesak Perbup Retribusi Sampah yang baru diubah (direvisi). Tolong kembalikan kepada Perda lama saja," ujar Endang saat di hadapan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.





Hal yang sama disampaikan Ketua Paguyuban TPST se Kabupaten Sidoarjo, H Hadi. Menurutnya, Perbup Retribusi Pengelolaan Sampah yang baru dinilai banyak memberatkan warga Sidoarjo, pengeledek hingga para pengelola TPST.

"Sudah selayaknya Perbup itu direvisi secepatnya. Kalau perlu kembalikan ke Perda lama saja biaya Retribusi sampah ke TPA hanya Rp 2.000 per Kepala Keluarga (KK) atau per rumah," pintah warga Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi, Sidoarjo ini.

Sementara itu, menanggapi tuntutan para pengelola TPST dan pengeledek sampah ini, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo mengaku bakal merevisi retribusi sampah yang masuk ke TPA Jabon. Kendati demikian, soal harga yang disesuaikan harus didiskusikan lagi dengan DLHK Pemkab Sidoarjo.

"Karena kalau hanya dikembalikan menggunakan Perda lama Rp 2.000 per KM maka TPA cepat penuh. Hanya dalam hitungan teknis 5 tahun TPA Jabon bakal penuh lagi. Karena tarif murah memicu orang tidak mengelola sampah akan tetapi menjadi penyalur sampah dari TPST ke TPA saja," tegas Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Selain itu, pihaknya dirinya siap memberikan win - win solution dalam merevisi Perbup itu. Artinya para pengeledek dan pengelola TPST tetap bisa hidup tenang karena pekerjaannya mendapatkan hasil, lingkungan di Sidoarjo tetap bersih dan yang terpenting TPA Jabon tidak cepat penuh. Apalagi saat ini sehari menampung 600 ton per hari.

"Dengan adanya revisi Retribusi kami minta pengeledek sampah l dan pengelola TPST berkomitmen mengurangi sampah yang hendak dikirim ke TPA. Kalau sekarang 600 ton per hari minimal jadi 400 ton per hari. Agar usia penampungan di TPA Jabon lebih lama sampai 15 tahun ke depan," ungkap Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.





Tidak hanya itu, Gus Muhdlor dan DLHK bakal memantau setiap pengelolaan TPST. Hal ini agar diketahui mana saja TPST yang hanya menjadi penyalur sampah dari TPST ke TPA dan mana yang benar-benar mampu mengelola sampah hingga tinggal 30 persen dari TPST mulai dipilah hingga dikelola menjadi magot dan pupuk kompos.

"Bila perlu diberi reward untuk TPST yang pengelolaannya baik seperti di TPST Berbek. Kalau desa yang belum punya TPST akan dibantu mendirikan TPST. Karena jumlah TPST dulu hanya sekitar 86 TPS sejak pemerintahan saya selama dua tahun terakhir menjadi 170 TPS. Mari tetap berkomitmen menjaga Sidoarjo tetap bersih dan semakin lebih baik dari hari ke hari dan semua makin sejahtera. Karena saya dan Pak Kadis DLHK tak ada niat sama sekali menyusahkan orang-orang yang peduli dengan pengelolaan sampah," pungkas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini. Hel/Waw

Bupati Sidoarjo Bersama Tokoh Lintas Agama Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah



Admin
May 16, 2023



Sidoarjo – [Metroliputan7.com](https://metro.liputan7.com) –

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali bersama jajaran forkopimda serta sejumlah tokoh lintas agama se-Kabupaten Sidoarjo sepakat menolak penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis. Kesepakatan itu tertuang dalam Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah yang mereka tandatangani pada Selasa (16/5/2023).

"Kami menolak segala bentuk politik praktis di tempat ibadah," demikian salah satu poin deklarasi yang dibacakan oleh perwakilan tokoh agama se-Kabupaten Sidoarjo dengan di pimpin oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam pembacaan deklarasi tolak kampanye di tempat ibadah di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo.

Pada kesempatan ini, Bupati Sidoarjo juga berpesan kepada seluruh umat beragama di Sidoarjo agar sama-sama berkomitmen agar menghindari politik praktis di tempat ibadah yang akan mengakibatkan konflik horizontal antar umat beragama.

"Namanya pesta demokrasi, perbedaan pilihan sudah biasa, sehingga mari kita bersama-sama menciptakan pesta demokrasi ini menjadi pesta yang sumringah, adem ayem, dan kondusif. Maka insyaAllah nanti pembangunan juga akan berlangsung dengan baik," tegas Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor juga menegaskan agar seluruh pemuka agama di Sidoarjo menyampaikan komitmen tolak kampanye di tempat ibadah ini kepada seluruh teman-teman lainnya, sehingga jangan sampai agama menjadi bahan bakar politik horizontal untuk kepentingan politik.

"Kita harus bersama-sama mengantisipasi hal ini karena dalam aturan KPU dan Bawaslu saat masa kampanye dan masa sesudah kampanye memang ada aturannya. Nah, saat masa sebelum kampanye ini yang harus kita waspadai, jangan sampai ada foto calon presiden di tempat ibadah." ucapnya.

Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan bahwa Forkopimda beserta pengurus tempat ibadah menolak tempat ibadah dijadikan ajang kampanye. Saat ini sudah pada tahapan-tahapan legislatif sehingga nantinya kami menginginkan situasi yang aman, tertib, damai, dan kondusif.

"Nantinya kegiatan ini akan diteruskan dan kami breakdown atau kami rinci kebawah dan kami kumpulkan seluruh tokoh agama dan masyarakat di masing-masing desa dan kecamatan. Jangan sampai pembangunan akan sia-sia jika adanya disintegrasi legislatif pilpres. Dan juga adanya kontra produktif yang mengakibatkan disintegrasi di masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, ketua FKUB Kabupaten Sidoarjo, Idham Kholiq mengatakan bahwa sejumlah tokoh lintas agama se-Kabupaten Sidoarjo juga telah sepakat untuk menolak dengan tegas penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik praktis.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kami sama-sama menyamakan pandangan dan saling berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai untuk kampanye, sebagaimana memang adanya larangan yang tertuang dalam UU Pemilu," tegasnya.

Tempat ibadah merupakan tempat yang harus digunakan sesuai fungsinya yaitu untuk melakukan segala jenis bentuk peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, apabila terdapat sebuah praktik yang menyalahi kegunaan tempat ibadah, apalagi sampai digunakan hanya untuk kepentingan politik praktis seperti berkampanye, maka seluruh elemen masyarakat harus bisa menolak dengan tegas hal tersebut.

Berikut Naskah Deklarasi Tolak Kampanye di Tempat Ibadah bersama Tokoh Agama di Wilayah Kabupaten Sidoarjo :

Kami Tokoh Agama se-Kabupaten Sidoarjo dengan ini menyatakan :

- 1. Menolak Segala Bentuk Politik Praktis di Tempat Ibadah.*
- 2. Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang aman, damai, dan kondusif.*
- 3. Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Baik dalam Kehidupan beragama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.*
- 4. Menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik. (dew/ir)*





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mendapat Laporan Warganya yang Membutuhkan Bantuan, Wabup Subandi Gercep dan Beri Solusi Kesehatan

Iswin Arrizal - Selasa, 16 Mei 2023 | 16:21 WIB



Wabup H. Subandi menghibur adik Riski yang sedang sakit (Foto : Win)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO, CAKRAWALA.CO - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesusahan, Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, hari ini Selasa 16 Mei 2023. Mendatangi dua warganya yang sedang membutuhkan bantuan karena sakit, yang pertama Muhammad Riski (11) warga Desa Sumokali, Kecamatan Candi dan yang kedua Suyono (66) warga Desa Blurukidul, Kecamatan Sidoarjo.

Muhamamd Riski, siswa kelas 4 Madrasah Ibtidayah Nahdatul Ulama (Minu) Desa Sumokali, tidak mau sekolah akibat sering dibully oleh temanya menderita benjolan pada hidung (tumor).

"Hari ini kita sidak warga yang sedang sakit, kita dapat laporan sudah 1,5 tahun mengalami sakit tersebut dan belum dapat tindakan. Kita sebagai Pimpinan daerah turun hadir percepatan penanganan agar segera di operasi, karena adik Muhammad Riski ini masih dalam masa pertumbuhan," Ujarnya.

Dalam kunjungan ke rumah Muhammad Riski, Pak Wabup bersama Dinas Kesehatan, Baznas, Camat, Kepala Desa dan Dinas Sosial, dengan harapan adik Riski segera diperhatikan dan ditangani sakitnya.



"InsyaAllah dengan kehadiran Pimpinan daerah agar segera bisa ditangani," Ungkap Ketua DPC PKB Sidoarjo, kepada jurnalis cakrawala.co.

Sementara itu Umiyah (56) tahun, nenek Muhammad Rizki saat dijumpai di rumahnya membenarkan cucunya tidak mau sekolah.

"ya cucu saya tidak mau sekolah karena adanya benjolan di mata dan hidungnya, selama ini sudah diperiksakan kedokter dengan menggunakan BPJS Kesehatan dari pemerintah namun masih menunggu panggilan," katanya.

Benjolan itu tumbuh sejak ia lahir,namun penyakitnya tidak sebesar saat ini hingga menutupi mata maupun hidungnya.Dari benjolan tersebut,rizki sering mendapatkan ejekan dari teman-temannya sehingga ia tidak mau masuk sekolah dan memilih di rumah.



Pak Wabup mendatangi Suyono yang dalam kondisi sakit sendiri di rumah
(Foto : Win)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dalam sidaknya ditempat kedua, Pak Wabup mengunjungi Suyono warga **Desa Bluru Kidul** yang mengalami **sakit** Selulitis ada infeksi akibat diabetes, yang ironisnya Suyono dalam kondisi **sakit** tinggal sendirian di rumahnya.

"Ada warga kita yang lagi **sakit**, dia tidak ada saudara tinggal sendiri. Dulu punya BPJS saat kerja, namun sekarang pak Suyono tidak bekerja sehingga tidak dicover jaminan sosial," Katanya.

Khusus untuk warga **Desa Bluru Kidul** yang **sakit** sebatang kara tidak ada saudara, mantan Kades Pabean Sedati, memerintahkan pihak Dinas Sosial agar dapat bantuan BPJS Kesehatan serta untuk makananya tiap hari akan dirim oleh Baznas.



Pak Wabup Subandi berpesan bagi masyarakat yang **sakit** diharapkan ada kepedulian lingkungan mulai di tingkat RT/RW hingga Pak Kades.

"Jika Kepala Desa tidak mampu menyelesaikan permasalahan maka Pemerintah harus hadir. Kalo seperti ini tidak mungkin bisa diselesaikan di tingkat desa, maka berdasarkan laporan yang kita terima lalu mencarikan solusi," Tutup Aba Subandi panggilan akrabnya



Perbup Sampah Direvisi, Paguyuban TPST Siap Ikut Tuntaskan Masalah Sampah di TPA Jabon

oleh redaksiWD © 16/05/2023

BAGIKAN



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menemui sejumlah perwakilan paguyuban TSPT dan mendengarkan satu persatu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (16/5/2023).

SIDOARJO (wartadigital.id) – Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116-118 Tahun 2022 tentang perhitungan biaya pengelolaan persampahan yang dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) direvisi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Revisi itu dilakukan sebagai win-win solution (jalan keluar) dalam mengatasi masalah persampahan di Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menemui sejumlah perwakilan paguyuban TSPT dan mendengarkan satu persatu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (16/5/2023). Kesimpulan dari pertemuan itu para pengelola sampah yang ada di TPST/TPS 3R merasa keberatan dengan penetapan tarif.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tarif yang ditetapkan untuk warga desa dan permukiman, senilai Rp 25 ribu-Rp 35 ribu per bulan yang tertuang dalam Perbup Nomor 116, 117 dan 118 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan. Kemudian tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton Rp 150.000 dan biaya angkut truk sampah dari TPST ke TPA Jabon Rp 165.000.

Latar belakang dibuatnya perbup sampah tersebut untuk mengurangi volume sampah yang ada di TPA Jabon. Sampah yang dikirim di TPA Jabon saat ini sudah overload, mencapai 600 ton per harinya. Bila hal itu dibiarkan terus maka umur TPA Jabon diprediksi hanya mampu bertahan 5 tahun.

"Pertemuan untuk mencari titik temu win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Pemkab Sidoarjo mendapat solusi mengatasi sampah dan paguyuban pengelola TPST tidak merasa dirugikan. Tujuan kita semua duduk di sini mencari jalan keluar. Jangan sampai anak cucu kita mendapat warisan sampah jika sampah yang ada sekarang tidak dikelola dengan baik," ujar Gus Muhdlor.

Pada pertemuan tersebut disepakati dua hal. Pertama Perbup sampah akan direvisi terkait penetapan tarif yang dinilai memberatkan dan yang kedua disepakati bahwa para pengelola TPST harus berkomitmen mengelola sampah di TPST sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon berkurang.

"Tidak ada menang-menangan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik mengatasi masalah sampah Sidoarjo. Saya minta pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban TPST berkomitmen untuk mengelola sampah di TPST masing-masing, paling tidak yang dikelola mencapai 60 persen dan sisanya yang sudah tidak bisa dikelola dikirim ke TPA Jabon," terangnya.

Bupati Gus Muhdlor meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan segera duduk bersama dengan para perwakilan paguyuban untuk membahas besaran retribusi sampah di TPA Jabon.

"Perbup sampah yang mengatur tarif akan direvisi. Saya minta DLHK dan perwakilan paguyuban duduk bersama membahas kesepakatan tarif ini," jelas Gus Muhdlor.

Pembangunan TPST dalam 2 tahun terakhir sudah masif. Dari jumlah 80 TPST di akhir 2020 sekarang sudah mencapai 170 TPST. Menurut Gus Muhdlor disebutkan pembangunan TPST tersebut agar pengelolaan sampah bisa lebih optimal dilakukan di hulunya sehingga di hilirnya sampah yang dikirim ke TPA Jabon yaitu jenis sampah yang sudah tidak bisa dikelola lagi.

"Tiap tahun kita bangun TPST, dan dari jumlah 80 titik dalam dua tahun ini sudah bertambah menjadi 170 an titik TPST. Ini terus kita dorong TPST lebih diberbanyak lagi agar pengelolaan sampah tiap desa bisa lebih maksimal," pungkasnya.



Sementara itu Kepala DLHK Sidoarjo M Bahrul Amiq menyampaikan, pertemuan dengan para perwakilan akan dilakukan secepatnya. Ia menjadwalkan Jumat besok pertemuan dilakukan di Kantor DLHK.

"Lebih cepat lebih baik, kita agendakan Jumat besok, karena Kamisnya tanggal merah. Nanti akan dibahas bersama dengan perwakilan 7 orang," katanya.

Amiq berharap dalam pertemuan tersebut mencapai kesepakatan yang bisa menjadi jalan keluar dalam mengatasi persoalan sampah di Sidoarjo. Mantan Kadishub Sidoarjo itu dengan gamblang menyampaikan jika sekarang perhari sampah yang masuk di TPA Jabon 600 ton paling tidak setelah adanya komitmen ini nanti sampah berkurang jadi 400 ton.

"Yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana mencari formula agar sampah yang dikirim ke TPA Jabon bisa berkurang. Dari yang 600 ton per hari berkurang jadi 400 ton. Jadi per harinya paling tidak berkurang 200 ton. Dan untuk bisa kesana harus ada komitmen bersama kalau Pemkab saja tidak mungkin bila pengelola di TPST tidak ada komitmen," jelasnya.

Koordinator paguyuban TPST Hadi Purnomo mengaku lega dengan direvisinya perbup sampah oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Ia juga mengaku siap menjalankan komitmen bersama para pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban.

"Kami sampaikan terimakasih kepada Pak Bupati dan kami siap berkomitmen ikut mendukung dan menuntaskan masalah sampah dengan maksimal mengelola di TPST. Jangan sampai sampah yang ada di TPA Jabon cepat penuh," katanya. sis





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ekecekuai Pasar Larangan Lambat. Disperindag Dituding Sediakan 'Amunisi' untuk Tembak Bupati

Ris

Facebook May 15, 2023, 11:35 AM



EMASRATI LAYUBUWI, ANGGOTA DPRD DAN ARIUS KUMALA LAYUBUWI, SIDOARJO

DNN, SIDOARJO – Aksi penertiban PKL di sisi timur Pasar Larangan harus segera dilakukan sebelum masalah itu diadak-atik pihak lain menjadi isu bernuansa politik untuk menyarung parpol dan juga pimpinan daerah yang berkuasa saat ini.

"Mestinya pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah red) paham soal itu, terutama Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan red). Sekarang ini khan tahun politik jadi harus diantisipasi," tandas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhanuani Chudleri.

Ia yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/05/2023) kemarin mengatakan berlurut-lurutnya aksi penertiban PKL yang berude di sisi timur Pasar Larangan itu rentan menjadi komoditas politik bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan parpol mayoritas yang menguasai legislatif dan eksekutif di Sidoarjo saat ini.

"Mereka ini (OPD-red) sama saja dengan sengaja menyediakan amunisi bagi parpol lain maupun calon bupati di Pilkada tahun depan untuk menembak bupati," tandas anggota fraksi PKB di DPRD Sidoarjo tersebut.

Menurutnya, lambatnya aksi Disperindag dalam melakukan revitalisasi Pasar Larangan ini bisa menimbulkan blunder besar. Karena apapun yang mereka lakukan pasti akan dicari titik lemahnya oleh lawan-lawan politik PKB untuk menyeringai dari semua sisi.

"Begitu diekecekuai, nanti ada yang bilang Bupati tidak memperhatikan nasib wong cilik yang mengals nafkah disana. Tapi tidak dibersihkan juga akan diarang karena dianggap menghalangi yang lain dan tidak mampu membuat pasar yang nyaman dan tertib. Khan repot," tambahnya.

Karena itu, tambah Dhanuani, OPD harus cerdas dan cekatan dalam menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh. Bukan saja di sisi penertiban yang menjadi tugas Satpol PP, namun juga di sisi penataan pasar dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bidang garapan Disperindag.

"Masalah ini harus diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh. Jangan parsial parsial. Terus setelah para PKL di sisi timur itu dibersihkan, rencana penataan space itu bagaimana? Disperindag sudah punya grand design-nya apa belum? Lalu konsep pemberdayaannya gimana?," tanya politisi yang akan kembali berkampanye di Pilkada 2024 itu.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Mestinya pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) paham soal itu, terutama Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan-red). Sekarang ini khan tahun politik. Jadi harus disegerakan," tandas Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.

Ia yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/05/2023) kemarin mengatakan berlarut-larutnya aksi penertiban PKL yang berada disisi timur Pasar Larangan itu rentan menjadi komoditas politik bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan parpol mayoritas yang menguasai legislatif dan eksekutif di Sidoarjo saat ini.

"Mereka ini (OPD-red) sama saja dengan sengaja menyediakan amunisi bagi parpol lain maupun calon bupati di Pilkada tahun depan untuk menembak bupati," tandas anggota fraksi PKB di DPRD Sidoarjo tersebut.

Menurutnya, lambannya aksi Disperindag dalam melakukan revitalisasi Pasar Larangan ini bisa menimbulkan blunder besar. Karena apapun yang mereka lakukan pasti akan dicari titik lemahnya oleh lawan-lawan politik PKB untuk menyerang dari semua sisi.

"Begitu dieksekusi, nanti ada yang bilang Bupati tidak memperhatikan nasib wong cilik yang mengais nafkah disana. Tapi tidak dibersihkan juga akan diserang karena dianggap mengabaikan yang lain dan tidak mampu membuat pasar yang nyaman dan tertib. Khan repot," tambahnya.

Karena itu, tambah Dhamroni, OPD harus cerdas dan cekatan dalam menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh. Bukan saja di sisi penertiban yang menjadi tugas Satpol PP, namun juga disisi penataan pasar dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bidang garapan Disperindag.

"Masalah ini harus diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh. Jangan parsial-parsial. Terus setelah para PKL di sisi Timur itu dibersihkan, rencana penataan space itu bagaimana? Disperindag sudah punya grand design-nya apa belum? Lalu konsep pemberdayaannya gimana?," tanya politisi yang akan kembali berkontestasi di Pilcaleg 2024 itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, program penataan Pasar Larangan yang digagas Disperindag Sidoarjo macet hingga lebih dari 6 bulan ini. Upaya memindahkan ratusan PKL liar yang membuka lapak di sisi timur pasar terus tertunda. Padahal sudah ada sebagian yang berhasil direlokasi di sisi barat.

Kondisi ini justru membuat sekitar 1.500 pedagang yang ada di dalam pasar menjadi kian terjepit. Mereka merasa dikepung PKL yang ada di sisi timur maupun sisi barat. Akibatnya dagangan mereka pun kian sepi dan terancam bangkrut.

Padahal para pedagang-pedagang itulah yang justru memberikan kontribusi ke kas daerah melalui pembayaran sewa kios dan los serta retribusi pasar yang dikutip setiap harinya. (pram/hans)

